



RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

TAHUN 2025 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga kota ini tetap dapat memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan kepada seluruh masyarakat di kota Tarakan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan bagian integral dari upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dasar bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya kepada masyarakat. Seperti diketahui bersama bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2025-2026 wajib menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapannya.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 2025-2026 ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan penyusunan renstra;
- b. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah;
- c. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah; dan
- f. Penetapan renstra perangkat daerah.

Berdasarkan tahapan yang sudah dilewati, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah ditetapkan wajib dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang setiap tahun tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sehingga terjadi sinergitas antara dokumen RPJMD, Renstra, dan Rencana Kerja yang setiap tahun dilakukan reuiu, monitoring dan evaluasi.

Mengakhiri bagian pengantar dari dokumen ini semoga dengan adanya dokumen Renstra Dinas Kesehatan 2025-2026 ini, pembangunan kesehatan turut andil dan mengambil peran dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan kota Tarakan tahun 2025-2026.

Billahi taufiq walhidayah Assalamualaikum Wr.Wb.



dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	9
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan	18
2.3. Kinerja Pelayanan dan Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	35
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	43
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	43
3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	49
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan	51
BAB V. STARTEGIS ARAH KEBIJAKAN	75
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	77
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG KESEHATAN ..	106
BAB VIII. PENUTUP.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023	19
Tabel 2.2	Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan per Unit/UPTD berdasarkan Jenis Kelamin dan Profesi Tahun 2023	20
Tabel 2.3.	Data Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Se Kota Tarakan	22
Tabel 2.4	Data Aparatur Sipil Negara di Puskesmas Se Kota Tarakan	23
Tabel 2.5	Pemenuhan Standar Ketenagaan Di Puskesmas Kota Tarakan Berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019.....	24
Tabel 2.6	Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kota Tarakan.	25
Tabel 2.7	Kondisi UPT Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan	26
Tabel 2.8	Data Rumah Sakit Se Kota Tarakan Tahun 2024	26
Tabel C-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan	29
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan.....	44
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	75
Tabel T-C. 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan	78
Tabel T-C.27.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Sebengkok.....	97
Tabel T-C.27.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Gunung Lingkas.....	98
Tabel T-C.27.4	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Pantai Amal.....	99
Tabel T-C.27.5	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Juata	100
Tabel T-C.27.7	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Mamburungan	101
Tabel T-C.27.8	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Mamburungan	102
Tabel T-C.27.9	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Karang Rejo.....	103
Tabel T-C.27.10	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Labkesda	104
Tabel T-C.27.11	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD RS Kota	105
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3
Gambar 1.2. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tahun 2024 masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan akan berakhir sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) akan dilakukan secara serentak pada Bulan Nopember 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Secara lebih jelas bahwa Rencana Strategis itu sendiri merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan periode 2019-2024.

RPJMN 2020-2024 merupakan siklus 3 dari RPJP 2005-2025 dengan tahapan Pembangunan dan arah kebijakan yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

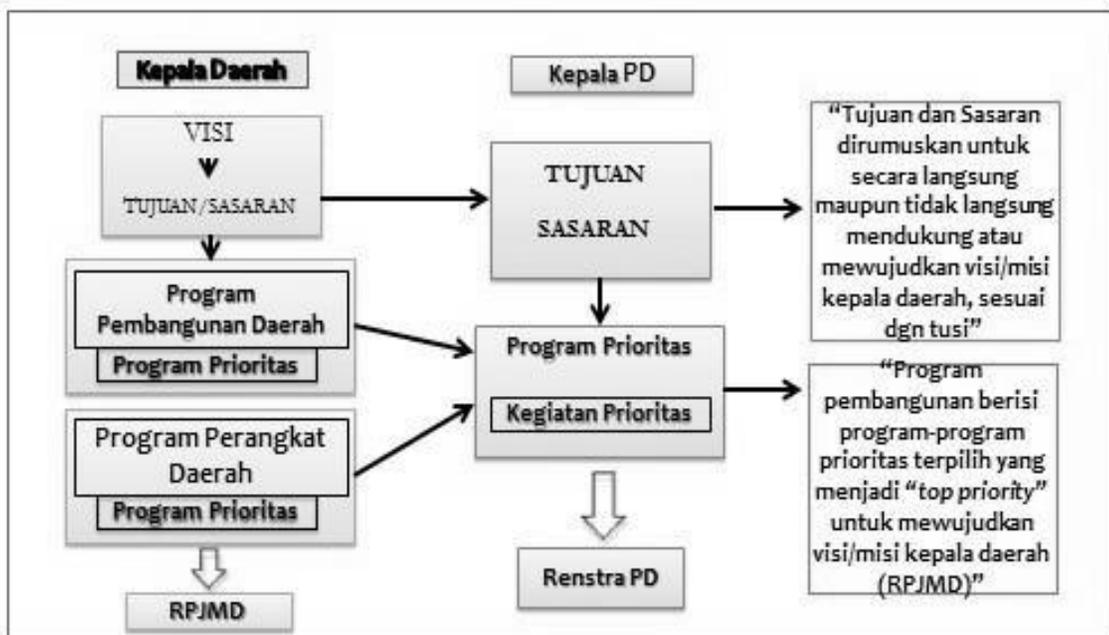
Kesehatan Bersama pendidikan, perumahan, dan mental/ karakter merupakan bagian dari dimensi pembangunan yang menjadi strategi pembangunan nasional. Dua dimensi lainnya yaitu dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Kesehatan kemudian menjadi sasaran pokok pembangunan nasional tahun 2020-2024. Terkait kesehatan sasaran makro yang menjadi sasaran pokok pembangunan nasional adalah Indeks Pembangunan Manusia.

Sasaran pokok pembangunan nasional bidang Kesehatan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yaitu:

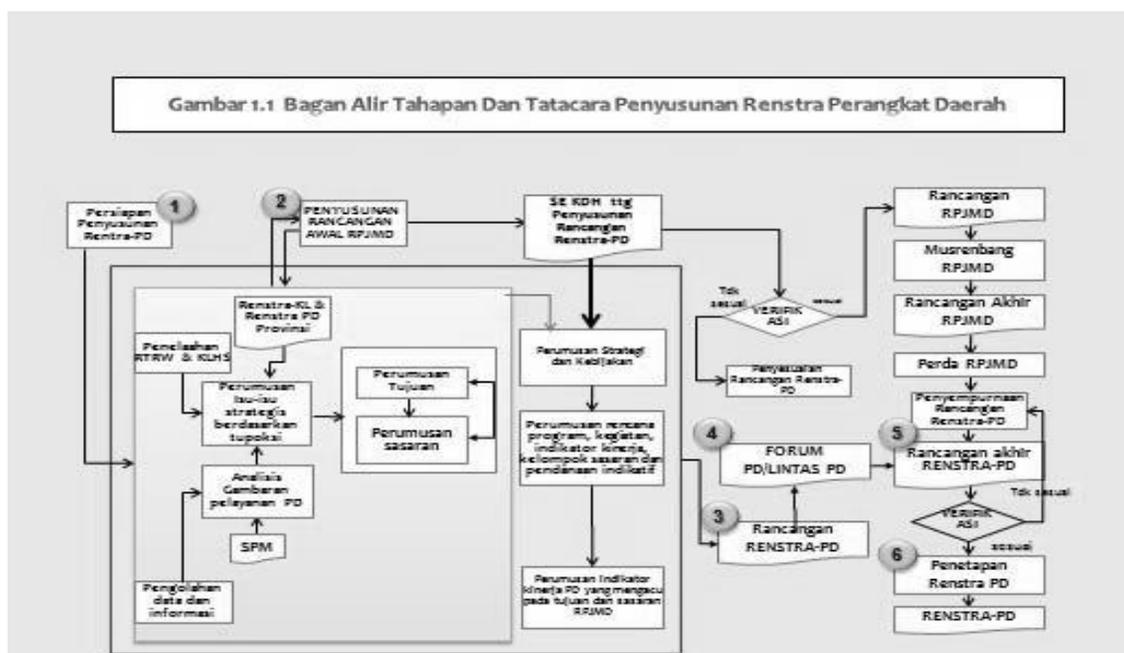
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat meliputi:
 - a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
 - b. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup.
 - c. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.
 - d. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah dua tahun).

2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - a. Prevalensi Tubekulosis (TB) per 100.000 penduduk.
 - b. Prevalensi HIV.
 - c. Prevalensi tekanan darah tinggi.
 - d. Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun.
 - e. Persentase merokok penduduk usia \leq 18 tahun.
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan meliputi:
 - a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi.
 - b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
 - c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan.

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.2. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



Dalam perjalanannya Renstra Dinas Kesehatan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi perjalanan pembangunan kota Tarakan agar tetap berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Tarakan di bidang kesehatan. Dokumen renstra ini kemudian menjadi aktualisasi bagi Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam usaha menafsirkan dan mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan kota Tarakan tahun 2025-2026 yang diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan dan diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2026 terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2028 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Kesehatan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Tarakan;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
29. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Kota Tarakan;

30. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah;
31. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
32. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-XI/549/ 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2026 adalah :
 - a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) Tahun
 - b. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun kedepan
 - c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan
 - d. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Tujuan dari penyusunan Renstra Transisi Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2026 adalah
 - a. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kota Tarakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang kesehatan;
 - b. menjadi acuan resmi bagi dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan kesehatan; dan
 - c. menjadi acuan resmi bagi penilaian kinerja Dinas Kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2015-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan, Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan;

Bab ini berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan serta Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan;

Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Bab ini memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu – isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas serta Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab ini menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini memuat program Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif Dinas Kesehatan tahun 2025-2026.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Bab ini berisi indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB. VIII. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tarakan kemudian menerbitkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 perubahan atas peraturan Wali kota Tarakan nomor 64 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas. Pasal 3 Peraturan Wali kota ini menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah.

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas
2. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan bidang kesehatan.
3. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Tehnis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Dinas Mempunyai tugas Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya;
5. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
 - e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas; penyusunan perjanjian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
 8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
 - b. Pembinaan dan penataan organisasi tata laksana dinas;
 - c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
 - e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.
 9. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 10. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan dinas;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
 - d. Penyiapan bahan dan bahan pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Kesehatan;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - f. Penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja dinas dan sistem
 - g. pengendalian intern Dinas; dan

- h. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris;
11. Bidang Kesehatan Masyarakat Merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, Bidang kesehatan masyarakat di pimpin oleh kepala bidang Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana;
 12. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 13. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh kepala Bidang; Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana;
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14. Bidang Pelayanan dan sumber daya Kesehatan Merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, Bidang Pelayanan dan sumber daya kesehatan di pimpin oleh kepala bidang, Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana;

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan dan rujukan tingkat Daerah; dan
- d. Pelaksanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat Daerah;
- e. Pelaksanaan pengelolaan Program Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;

- f. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin rumah sakit kelas C, kelas D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah; pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
- g. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
- h. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
- j. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- k. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan penertiban sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- m. Pelaksanaan pengawasan pasca-penjualan produk makanan minuman industri rumah tangga;
- n. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

unit kerja di bawah Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Saki Umum Kota Tarakan;
- 2. UPTD Puskesmas:
 - a. Karang Rejo

- b. Gunung Lingkas
 - c. Puskesmas Sebengkok
 - d. Puskesmas Mamburungan
 - e. Puskesmas Pantai Amal
 - f. Puskesmas Juata
3. UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 4. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- b). Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Kota Tarakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Pada Pasal 43 menjelaskan bahwa Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yaitu :
- 1) Penyelenggara Pelayanan pengobatan dan Pemulihan kesehatan sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit;
 - 2) Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Perorangan Melalui Pelayanan Kesehatan yang Paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan
- c) Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Instalasi Farmasi, pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dan kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan UPTD. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi; pelaksanaan persiapan penyusunan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;

- 1) Pelaksanaan penerimaan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Pengamanan dan pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - 3) Pelaksanaan pemeliharaan sarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 4) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 5) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 6) Pelaksanaan pengujian peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 7) Pelaksanaan kalibrasi peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
 - 9) Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- d) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan secara laboratorium pada Dinas Kesehatan. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- 1) pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kimia, patologi, imunologi, Hematologi dan Urinalisa;
 - 2) Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi mikrobiologi dan kimia analisa makanan / minuman;
 - 3) pelaksanaan pemantauan mutu internal meliputi Pemantauan Mutu Internal (PMI) dan Pemantauan Mutu Eksternal (PME);
 - 4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - 5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
 - 6) penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- e) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan

upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perseorangan, dan upaya keselamatan pasien dan pencegahan pengendalian infeksi yang menjadi kewenangan Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di Puskesmas;
- 2) Menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Puskesmas;
- 3) Merumuskan kebijakan operasional tingkat Puskesmas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan operasional dari Dinas Kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama dan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
- 5) Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas sektor dan lembaga terkait lainnya, untuk kepentingan pelaksanaan tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
- 6) Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, bimbingan, motivasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pegawai;
- 7) Melakukan evaluasi kinerja upaya pelayanan kesehatan puskesmas berdasarkan rencana kerja;
- 8) Mempertanggungjawabkan tugas puskesmas secara administratif dan operasional kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tarakan



2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ketentuan mengenai tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain Tenaga Kesehatan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Dinas Kesehatan dan UPT juga didukung oleh tenaga non kesehatan. Secara rinci kondisi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan
Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023

No	Bidang	Jumlah ASN	L	P	Tingkat Pendidikan						
					SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Bidang Kesehatan Masyarakat	12	2	10			3		9		
2	Bidang P2P	12	3	9			2		10		
3	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	12	3	9		1	4		4	2	1
4	Sekretariat	12	4	8		1			9	2	
5	Puskesmas Karang Rejo	51	7	44		4	39		8		
6	Puskesmas Gunung Lingkas	37	3	34		4	26		7		
7	Puskesmas Sebengkok	34	6	28		4	22		8		
8	Puskesmas Mamburungan	29	6	23		4	20		5		
9	Puskesmas Juata	37	10	27		5	26		6		
10	Puskesmas Pantai Amal	15	4	11		0	8		7		
11	Laboratorium Kesehatan Daerah	7	3	4		0	5		2		
12	Instalasi Farmasi (IFK)	5	1	4		0	3		2		
Total		263	52	211		23	158		77	4	1

Sumber Data: Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2023

Tabel 2.2
Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan per Unit/UPTD berdasarkan
Jenis Kelamin dan Profesi Tahun 2023

No	Bidang	Jumlah	L	P	Dokter Umum	Dokter Gigi	Apoteker	Asisten Apoteker	Perawat	Bidan	Analisis	Penyusunan Program Anggaran Dan Pelaporan	Sanitarian	Admin	Security	Supir	Cleaning Service	Nutrisi	Penyuluh Kesehatan	Epidemiolog	Juru Parkir	Inspektur Sarpras
1	Dinas Kesehatan	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	1	4	0	0	0	0	0
2	Puskesmas Karang	33	13	20	4	1	1	0	5	5	0	0	1	0	3	4	6	1	0	1	1	0
3	Puskesmas Gunung	26	11	15	1	1	1	0	3	3	0	0	2	0	3	4	5	1	0	1	1	0
4	Puskesmas	25	13	12	1	0	1	0	2	5	2	0	1	1	2	4	5	0	0	0	1	0
5	Puskesmas Mamburungan	20	7	13	1	1	1	0	5	2	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0
6	Puskesmas Juata	44	14	30	3	1	0	2	8	5	0	1	0	6	4	5	6	1	0	2	0	0
7	Puskesmas Pantai Amal	14	5	9	0	0	0	0	4	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0
8	Labkesda	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0
9	IFP2FPK	6	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1
To		188	82	10	10	4	5	2	27	21	2	4	6	19	1	20	33	5	1	6	3	1

DATA SUMBER DAYA RS KOTA TARAKAN

No.	Jenis Pelayanan	ASN	NON-ASN	JUMLAH
Pelayanan Medik Dasar				
1	Dokter Umum	3	15	18
2	Dokter Gigi	0	1	1
Pelayanan Medik Spesialis Dasar				
1	Penyakit dalam	0	2	2
2	Kesehatan anak	2	0	2
3	Bedah	0	0	0
4	Obstetri & Ginekologi	1	0	1
Pelayanan Medik Spesialis Penunjang				
1	Anestesiologi	0	1	1
2	Radiologi	1	0	1
3	Patologi Klinik	1	0	1
4	Rehabilitasi Medik	1	0	1
5	Jantung	0	1	1
Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut				
1	Konservasi / endodonsi	0	0	0
2	Penyakit mulut	1	0	1
Pelayanan Kefarmasian				
1	Kepala instalasi farmasi RS	1	0	1
2	Apoteker bertugas di rawat jalan	1	2	3
3	Apoteker bertugas di rawat inap	0	5	5
4	Apoteker bertugas di IGD	0	4	4
5	Apoteker bertugas di Gudang Farmasi	3	2	5
6	Apoteker bertugas di Farmasi Klinik dan OK	0	2	2
7	Apoteker bertugas di percampuran aseptik dispensing	0	2	2
Tenaga Kesehatan dan Petugas Lainnya				
1	Psikolog Klinis	0	0	0
2	Keperawatan (Perawat)	15	93	108
3	Kebidanan (Bidan)	4	35	39
4	Perawat Gigi	3	1	4
5	Analisis Laboratorium	3	7	10
6	Analisis (Management)	8	0	8
7	Verifikator Medis	0	2	2
8	Kesehatan Kerja	1	2	3
9	Tata Boga & Pramusaji	0	8	8
10	Binatu / Laundry	0	9	9
11	Security	0	16	16
12	Sopir Ambulance	0	5	5
13	Gizi (Nutrisionist)	2	1	3
14	Porter	0	4	4
15	Cleaning Service	Pihak Ketiga		
16	Tukang kebun	Pihak Ketiga		
17	Keterampilan Fisik / Fisioterapi	0	1	1

No.	Jenis Pelayanan	ASN	NON-ASN	JUMLAH
18	Radiografer	2	3	5
19	Keteknisian Medis / Atem	1	0	1
20	Rekam Medik	1	3	4
21	Petugas IPSRS	0	7	7
22	Petugas Pengelola Limbah (Sanitarian)	2	0	2
23	Petugas Kamar Jenazah	0	2	2
24	Petugas CSSD	1	4	5
25	Tenaga Administrasi (tenaga sma, umum,akk,D3 umum)	4	29	33
26	Tenaga Teknisi / Teknisi Peralatan dan Mesin	0	11	11
27	Pejabat Struktural	12	0	12
	Jumlah	74	281	354

Tabel 2.3.
Data Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Se Kota Tarakan

No.	Nama Faskes	Total Per Faskes			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	RS CARSA TARAKAN	0	0	1	10
2	RS BHAYANGKARA TARAKAN POLDA KALTARA	8	26	25	36
3	RSUD dr. H. Jusuf SK	280	579	341	420
4	RSAL ILYAS TARAKAN	6	29	33	49
5	RS PERTAMINA TARAKAN	2	1	152	137
6	RSU KOTA TARAKAN	28	49	91	211

Tabel 2.4

Data Aparatur Sipil Negara di Puskesmas Se Kota Tarakan

No.	Nama Faskes	Total Per Faskes			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	PANTAI AMAL	5	10	6	11
2	MAMBURUNGAN	5	25	9	14
3	GUNUNG LINGKAS	3	34	15	18
4	SEBENGGOK	6	29	16	14
5	KARANG REJO	8	45	21	41
6	JUATA	11	27	16	34

Sumber Data: SDMK Tahun 2023

Pemenuhan Standar Ketenagaan Di Puskesmas Kota Tarakan Berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 4.1.2, untuk Kota Tarakan hampir semua tenaga Kesehatan dapat terpenuhi, namun masih terdapat dua tenaga yang belum mencukupi yaitu Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dan Tenaga Sistem Informasi Kesehatan

Tabel 2.5
Pemenuhan Standar Ketenagaan Di Puskesmas Kota Tarakan
Berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019

JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH TENAGA KESEHATAN	SESUAI STANDAR (Puskesmas Valid)		BELUM SESUAI STANDAR (Puskesmas Valid)		
		JUMLAH	%	JML PUSK < STANDAR (Puskesmas Valid)		KEKURANGAN NAKES (Orang)
				JUMLAH	%	
Perawat	82	6	100%	0	0%	0
Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer	48	6	100%	0	0%	0
Dokter Gigi	10	6	100%	0	0%	0
Bidan	61	6	100%	0	0%	0
Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	24	6	100%	0	0%	0
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	6	1	17%	5	83%	6
Tenaga Sanitasi Lingkungan	14	6	100%	0	0%	0
Nutrisionis	11	6	100%	0	0%	0
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	13	6	100%	0	0%	0
Tenaga Administrasi Keuangan	14	6	100%	0	0%	0
Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	5	3	50%	3	50%	3

Sumber: SISDMK Dinkes Kota Tarakan 2023

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan
dan UPT Kota Tarakan

No	Jenis Sarana	Kondisi Sarana				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Rumah Sakit Kota Tarakan Tipe C	1	0	0	0	1
2	Puskesmas Non Perawatan	5	1	0	0	6
3	Puskesmas Pembantu	1	1	0	0	2
4	Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan	1	0	0	0	1
5	Laboratorium Kesehatan	0	1	0	0	1
6	Pos Kesehatan Desa	1	0	0	0	1
7	Mobil Operasional	13	2	0	0	15
8	Ambulans Transport	10	2	0	2	14
9	Motor	59	0	0	4	63

Sumber Data: Laporan Aset Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Tabel 2.7
Kondisi UPT Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan

No.	Unit Pelaksana Teknis	Wil. Kecamatan/ Kelurahan
1	UPT Labkesda	Se-Kota Tarakan
2	Puskesmas Juata	Tarakan Utara, Kel: Karang Harapan, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut
3	Puskesmas Karang Rejo	Tarakan Barat, Kel: Karang Rejo, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, dan Karang Balik
4	Puskesmas Gunung Lingkas	Tarakan Timur, Kel: Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, Pamusian, Kampung 1
5	Puskesmas Mamburungan	Tarakan Timur, Kel: Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung 4 Kampung 6
6	Puskesmas Pantai Amal	Tarakan Timur, Kel: Pantai Amal
7	Puskesmas Sebengkok	Tarakan Tengah, Kel: Sebengkok, Selumit, Selumit Pantai.
8	RS Kota Tarakan	Se-Kota Tarakan

Kota Tarakan saat ini merupakan kota dengan jumlah Rumah sakit dan klinik terbanyak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat rumah sakit di Kota Tarakan yang merupakan pusat rujukan regional, yaitu RSUD dr. H. Jusuf SK yang sebelumnya bernama RSUD Tingkat I Tarakan.

Saat ini jumlah rumah sakit di Kota Tarakan terus bertambah dengan pengelolaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kota), TNI/Polri, BUMN dan Swasta. Secara lengkap kondisi Rumah Sakit di Kota Tarakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8
Data Rumah Sakit Se Kota Tarakan Tahun 2024

No	Kode	Nama Fasyankes	Alamat	Tipe	Jenis	Tingkatan	Penyelenggara
1	R6473016	RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan	Jl. P. Irian No.01	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas B	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

No	Kode	Nama Fasyankes	Alamat	Tipe	Jenis	Tingkatan	Penyelenggara
2	R6473042	RSAL Ilyas Tarakan	Jl. RE. Martadinata No. 29 Kel. Pamusian kec. Tarakan Tengah. Tarakan	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas D	Lantamal XIII TNI AL
3	R6473043	RS Pertamina Tarakan	Jl. Mulawarman No. 99, Tarakan, Kalimantan Utara	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas C	BUMN PT. Pertamina
4	R6571044	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	JL. AKI BABU NO.170 RT.01	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas C	Pemerintah Kota Tarakan
5	R6473045	RS Bhayangkara Polda Kaltara	Jl. Karya Bersama Rt. 18 Juata Laut Tarakan	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas C	Polda Kalimantan Utara
6	R6473030	Rumah Sakit Umum Carsa Tarakan	Jl. Sebengkok Tiram Rt. 10 No. 03 Sebengkok	Rumah Sakit	RS Umum	Kelas D	Swasta (PT. Carsa Medika Utama)

Sumber: SISDMK Dinkes Kota Tarakan Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan dan Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukan dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, serta target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Pendukung lainnya.

Pencapaian kinerja dan keuangan mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun sebelumnya dengan capaian sebagai berikut:

Tabel C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	-	IKU/IKK	DALEV	42	42	42	42	41	42	63	42	127		100	150	100	302	
2	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	-	IKU/IKK	DALEV	12	6	6	6	6	6	4	7	7		50	67	117	117	
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%		IKU	IKP	14,8	10,00	9,5	7,5	14,0	14,8	8,8	6,39	4,56		100	88	67,26	61	
4	Indeks Keluarga Sehat	Angka		IKU	IKP	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	n/a	0,1	0,21	0,43		#VALUE!	100	105	143	
5	Cakupan Kepesertaan JKN	%		IKU	IKP	50	96	97	98	98	95	97	97,53	99,51		190	101,04	100,55	101,54	
6	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai		IKU		70/B	70/B	70/B	70/B	77/BB	67/B	75,57/BB	84.42/A	84/A		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7	Indeks Kepuasan masyarakat	Nilai		IKU		70	71	72	73	75	80,25	85	84,26	85,29		114,6428571	119,718	117,028	116,8356	
8	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	127,38	91,22	97,34	98,00		127,38	91,22	97,34	98	
9	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	133,83	93,11	98,44	99,00		93,11	98,44	99	0	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Kesehatan Sesuai Standar																			
10	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	137,75	94,64	100	97	94,64	100	97	0		
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	20,01	25,7	43,65	100,00	20,01	25,7	43,65	100		
12	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	93,63	38,54	90,69	44,45	93,63	38,54	90,69	44,45		
13	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	16,08	19	23	86	16,08	19	23	86		
14	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	4,81	5,46	13,35	100	4,81	5,46	13,35	100		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar																			
15	Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		SPM			100	100	100	100	100	10,05	15,89	17,48	42,83		10,05	15,89	17,48	42,83	
16	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	31,54	46,09	55,09	64,23		31,54	46,09	55,09	64,23	
17	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	63,12	67,86	70,11	100,91		63,12	67,86	70,11	100,91	
18	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	56,85	118	100	103,60		56,85	118	100	103,6	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
19	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100	100	100	100	100	100	119	100	102,23	100	119	100	102,23		
20	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	-		IKP	100	100	100	100	100	100	94,9	93,87	100	100	100	100			
21	Persentase Alat Kesehatan di UPT yang telah Terkalibrasi	%			IKP	100	100	100	100	100	98	98		100	93,87	0	0			
22	Jumlah UPT yang Terakreditasi	Angka			IKP	4	3	6	4	7	7	7	7	7	98	98	175	0		
23	Cakupan Pneumonia Balita	%			IKP	100	100	100	100	100	52,5	88,08	92,5	71,9	175	233,3	116,7	175		
24	Cakupan Penemuan Diare Semua Umur	%			IKP	100	100	100	100	100	52	169,6	62,88	41,35	52,50	169,6	92,5	71,9		
25	Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun yang Dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	%			IKP	40	40	40	40	40	5,5	0	2,8	2,57	52,00	169,6	62,88	41,35		

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
26	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Minimal 50% Sekolah	%			IKP	34	50	50	50	50	28	28	34	62,31		13,75	0	7	6,425	
27	Cakupan Kelurahan UCI	%			IKP	85	90	95	97	100	40	25	25	62,2		82,35	56,00	68,00	124,62	
28	Cakupan Kelurahan yang Mengalami KLB dilakukan PE < 24 Jam	%			IKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100		47,06	27,78	26,32	64,12	
29	Persentase Posyandu Aktif	%			IKP	25	30	35	35	45	23,84	30,41	24,3	73,65		100,00	100,00	100,00	100,00	
30	Persentase PHBS Tatanan Rumah Tangga	%			IKP	50	55	60	65	65	39,6	39,68	53,11	53,11		95,36	101,37	69,43	210,43	
31	Prevalensi wasting pada balita (kurus dan sangat kurus)	%			IKP						1,65	2,02	1,83	1,2		79,20	72,15	88,52	81,71	
32	Persentase Tindak lanjut kasus gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing, dan kera)	%			IKP	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
33	Cakupan Kelurahan yang mengalami KLB	%			IKP	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	dilakukan PE < 24 jam																			
34	Angka Kesakitan (IR) DBD	per 100.000 penduduk			IKP	<48	< 48	< 48	< 48		46,9	25,4	267,2	166		100	100	100	100	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan capaian kinerja dan perubahan status kesehatan serta kondisi demografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi selama hampir 5 (lima) tahun terakhir di kota Tarakan, Dinas Kesehatan memiliki banyak tantangan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan dan mencapai derajat kesehatan sesuai target. Tantangan tersebut berasal dari situasi internal seperti kondisi organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPT, belum terjaminnya ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar akreditasi, kebutuhan obat-obatan, dan perbekalan kesehatan di seluruh UPT, dan permasalahan lainnya yang secara lokalitas terjadi di wilayah kerja Puskesmas dan UPT lainnya.

Tantangan yang dihadapi kota Tarakan terkait pembangunan kesehatan yaitu capaian SPM Kesehatan bidang siklus hidup yang masih rendah yang menyebabkan masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Permasalahan selanjutnya yang menjadi tantangan pembangunan kesehatan yaitu transisi epidemiologi yang menyebabkan masih tingginya prevalensi atau kejadian penyakit menular, terjadinya lagi kasus penyakit menular yang sejak lama telah dapat diberantas, dan di saat bersamaan kejadian penyakit tidak menular meningkat seiring dengan perubahan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat Tarakan. Hal ini bisa dilihat dari masih rendahnya capaian SPM terkait upaya skrining kesehatan terhadap penduduk usia produktif, pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi, pelayanan kesehatan terhadap penderita diabetes melitus. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

2.4.1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.

AKI di Tarakan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir tercatat mengalami kenaikan dari batas maksimal yang telah ditetapkan tingkat Kota Tarakan. Berdasarkan data Tahun 2019 sebesar 106 per 100.000

Kelahiran Hidup (KH), tahun 2020 sebesar 42 per 100.000 KH , Tahun 2021 sebesar 63 per 100.000 KH, Tahun 2022 sebesar 42 dan tahun 2023 sebesar 127 per 100.000 kelahiran.

Angka Kematian Bayi adalah Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Kondisi kesehatan Ibu selama masa kehamilan akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan. Monitoring kesehatan yang dilakukan secara rutin minimal AKB di Kota Tarakan masih menjadi masalah berdasarkan data terlihat Tahun 2020 sebesar 6 per 1000 Kelahiran, Tahun 2021 sebesar 4 per 1000, Tahun 2022 sebesar 7 per 1000, dan 7 per 1000 kelahiran tahun 2023

AKI dan AKB menunjukkan angka yang sama-sama meningkat. Faktor utama penyebabnya adalah tidak maksimalnya layanan *Ante Natal Care* / Kunjungan kehamilan ke tenaga kesehatan oleh Ibu hamil. Sebagian besar kasus kematian dikarenakan Pemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan pada saat menjelang proses melahirkan, sehingga faktor risiko seperti hipertensi, Kurang energy Kronik, anemia, usia ibu saat hamil, jarak persalinan, jumlah paritas dan adanya infeksi penyakit menular yang dialami oleh ibu selama kehamilan tidak dapat dikontrol. Selain itu Program Perencanaan Pertolongan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya.

2.4.2. Standar Pelayanan Minimal Siklus Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, setiap kabupaten/kota wajib memenuhi 12 indikator SPM. Berdasarkan kedua belas indikator tersebut, terdapat SPM siklus hidup, SPM penyakit tidak menular, dan SPM penyakit menular. Kondisi capaian indikator SPM siklus hidup dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. Persentase capaian Tahun 2021 sebesar 91,22 %, Tahun 2022 sebesar 97,34 dan Tahun 2023 sebesar 89,48%.
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Capaian Tahun 2021 sebesar 93,11 %, Tahun 2022 sebesar 98,44 % dan Tahun 2023 sebesar 90,77 %.

- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir. Capaian Tahun 2021 sebesar 94,64%, Tahun 2022 sebesar 100%, Tahun 2023 sebesar 89,91%
- d. Pelayanan Kesehatan Balita. Capaian Tahun 2021 25,7%, Tahun 43,65%, Tahun 2023 sebesar 117,33%.
- e. Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar. Capaian Tahun 2021 sebesar 38,54 %, Tahun 2022 sebesar 90,69 % dan Tahun 2023 sebesar 44.05%
- f. Pelayanan Kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun ke atas. Capaian indikator Tahun 2021 sebesar 5,46 %, Tahun 2022 sebesar 13,35% dan Tahun 2023 sebesar 284,30%

2.4.3. Standar Pelayanan Minimal Penyakit Menular dan Tidak Menular.

- a. Pelayanan kesehatan usia produktif (15-59 tahun). Capaian indikator ini belum menjangkau seluruh sasaran yang menjadi target yang akan dilakukan skrining kesehatan setiap tahun. Pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 35,5% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 25,1% dan tahun 2020 capaiannya mengalami penurunan yang signifikan sebesar 16,1% Capaian indikator SPM ini masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Kegiatan skrining PTM pada usia produktif tidak maksimal dilakukan karena pandemi covid-19, SDM Kesehatan yang kurang, terbatasnya waktu petugas untuk melakukan skrining kesehatan minimal satu kali di luar gedung, tidak tersedianya BHP pemeriksaan gula darah, metode pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan yang belum optimal dari fasilitas kesehatan dan jejaringnya.
- b. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Capaian indikator ini juga masih sangat rendah. Pada tahun 2018 capaian indikator ini di tingkat kota hanya sebesar 11,94%. Pada Tahun 2019 meningkat menjadi 18,90% dan Tahun 2020 menurun menjadi 10.04%. Rendahnya capaian kedua indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu tidak cukup tersedianya alat dan bahan habis pakai (reagen) untuk pemeriksaan gula darah dan skrining dan sistem pencatatan dan pelaporan dari seluruh fasilitas kesehatan yang belum valid karena mengalami double

pendataan ataupun tidak terdatanya pasien yang mengalami hipertensi atau diabetes melitus.

- c. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. Pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 15,05% sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 60%. Pada tahun 2020 capaian mengalami penurunan sebesar 31,53%. Capaian indikator ini masih sangat rendah yang artinya belum keseluruhan penderita diabetes melitus terjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di FKTP.

2.4.4. Prevalensi Penyakit Menular.

- a. Angka kesakitan (IR) DBD. Target IR (*incident rate*) DBD di kota Tarakan yaitu < 48 per 100.000 penduduk. Sejak tahun 2019- 2020 IR DBD di Kota Tarakan berada di angka 293 per 100.000 penduduk, tahun 2020 mengalami penurunan 46,9 per 100.000 penduduk Hal ini menjadi gambaran bahwa angka kesakitan akibat penyakit DBD masih tinggi.
- b. Jika dilihat dari pelaksanaan pencegahannya yaitu pemeriksaan jentik, persentase ABJ (angka bebas jentik) juga masih jauh dari target 95%. Pada tahun 2020 capaian ABJ tingkat kota yaitu sebesar 35% . Capaian pada Penyebab dari rendahnya ABJ ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu ketersediaan bubuk abate yang masih terbatas untuk didistribusikan ke masyarakat. Faktor lainnya yang menyebabkan ABJ masih sangat tinggi adalah akses air bersih melalui jalur perpipaan yang belum menjangkau seluruh masyarakat.
- c. Kejadian penyakit menular yang juga terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu kejadian leptospirosis yang terjadi di kelurahan yang naik hingga status Kejadian Luar Biasa. Kondisi lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya kembali penyakit leptospirosis di beberapa kelurahan.

2.4.5. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

Capaian imunisasi masih rendah pada tahun 2020 masih rendah yaitu 40% hanya 8 kelurahan yang UCI dari 20 Kelurahan, sedangkan capaian tahun 2021 yaitu 25%, mengalami penurunan yang signifikan hanya 5 Kelurahan yang UCI.

2.4.6. Kualitas Penyehatan Lingkungan

Capaian yang masih rendah untuk program penyehatan lingkungan di Kota Tarakan yaitu persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan. Capaian tahun 2019 0,8%, 2020 untuk program ini yaitu sebesar 53,2% dan pada tahun 2021 capaian sebesar 71% dari target sebesar 50% .

2.4.7. Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Dokter dan Dokter Gigi. Rasio tenaga medis per satuan penduduk merupakan kontribusi dari banyak pihak dalam pelayanan kesehatan di FKTP beserta jaringan dan jejaringnya dan FKRTL. Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan dimana rasio Dokter umum tahun 2019 9,4 per 100.000 penduduk sedangkan rasio Dokter gigi 21,2 per 100.000 penduduk jika dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan signifikan yaitu 5,9 per 100.000 penduduk, yang artinya terjadi kekurangan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kondisi tenaga medis di seluruh UPT Puskesmas mengalami kekurangan dimana ada beberapa tenaga kesehatan dan saat ini Upaya pemenuhannya dilaksanakan melalui pengangkatan tenaga kontrak.

Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan UKM di Puskesmas, kondisi tenaga kesehatan masyarakat juga mengalami kekurangan, diantaranya tenaga perencanaan di beberapa Puskesmas yang pelaksanaan tugas dan fungsinya masih dirangkap oleh tenaga kesehatan masyarakat lainnya. Tenaga penyuluh Kesehatan dan tenaga kesehatan masyarakat lainnya juga mengalami kekurangan karena tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas di Puskesmas pindah wilayah kerja ke kabupaten/kota lain.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, saat ini juga belum ada pengangkatan jabatan fungsional untuk tenaga kesehatan masyarakat, seperti epidemiolog kesehatan, administrator kesehatan, dan penyuluh kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan SPM bidang kesehatan baik itu SPM UKP maupun SPM UKM

di Puskesmas, tenaga kesehatan yang juga mengalami kekurangan seperti tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan.

2.4.8. Prevalensi Stunting.

Target pencapaian baduta stunting di kota Tarakan yaitu < 5% dari seluruh baduta yang dilakukan penimbangan. Secara absolut jumlah baduta stunting di Tarakan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 118 untuk baduta . Jika dikonversi ke dalam persentase capaian ini yaitu sebesar 4,45%. Sedangkan stunting pada Balita 512 (8,0%).

Capaian Tahun 2023 sebesar 4,5 % dari target 7,5 % sehingga capaiannya adalah 60 %, masih belum tercapai.

Berdasarkan angka stunting baduta saat ini di kota Tarakan dapat dilihat bahwa tantangan untuk menekan angka stunting yaitu Berada pada kemampuan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan pada 1000 hari pertama kelahiran dan melibatkan lintas sector yang bersifat kordinasi dan integrasi.

2.4.9. Capaian PIS-PK

PIS PK merupakan akronim dari Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga. Sejak tahun 2017 program ini berjalan di Puskesmas. Hal yang pertama dilaksanakan dalam program ini adalah pendataan. Hingga tahun 2019 proses pendataan secara total rumah tangga sasaran masih berlangsung. Tahun 2023 kegiatan PIS PK masih terus dilakukan, capaiannya adalah sebesar 0,43 dari target 0,3 atau 143%. Hasil pendataan sementara terhadap 12 indikator ini memperlihatkan beberapa indikator keluarga sehat masih berada di status pra sehat seperti indikator: pemantauan pertumbuhan balita (70,5%), penderita hipertensi berobat teratur (78,8%), dan penderita gangguan jiwa diobati dengan teratur dan tidak diterlantarkan (78,8%).

Tantangan yang dihadapi dari pelaksanaan program ini sebagian besar terjadi dalam proses pendataan seperti masih adanya penolakan dari masyarakat, penghuni rumah tidak pernah ditemui pada saat proses pendataan, dan sarana serta prasarana yang belum memadai untuk proses mobilisasi orang dan peralatan di lapangan.

2.4.10. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC)

Cakupan JKN pada tahun 2019 sebesar 96% , tahun 2020 menurun sebesar 95% dan tahun 2021 mengalami peningkatan 98,52% dari target 96% Setiap tahun jumlah penduduk di Tarakan terus bertumbuh. Capaian tahun 2023 sebesar 99,51 % dari target 98% melebihi target yang diberikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh masyarakat agar menjadi peserta JKN aktif baik itu melalui anggaran PBI ataupun peserta mandiri. Sehingga sosialisasi JKN juga harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi peserta JKN.

2.4.11. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Target capaian PHBS Rumah Tangga di kota Tarakan yaitu sebesar 65%. Capaian pada tahun 2020 masih berada di angka 39,60% dan pada tahun 2021 capaiannya yaitu sebesar 39,68%. Pemantauan PHBS dilakukan kepada rumah tangga terpilih yang menjadi sampel yaitu 210 Rumah tangga.

2.4.12. Pengelolaan dan Pengembangan Data Informasi Kesehatan.

Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. Tingginya aktivitas Masyarakat untuk mengakses teknologi informasi melalui *platform* dagang dan *platform* media sosial juga menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan terkait masalah kesehatan, Dinas Kesehatan dituntut untuk mengubah orientasi upaya preventif dan promotif yang tidak lagi mengandalkan kegiatan preventif dan promosi kesehatan melalui luar jaringan, Dinas Kesehatan juga harus memberikan data dan informasi yang berimbang secara cepat, ikut aktif, dan terpacu dengan kecepatan informasi yang membuat banjirnya informasi dan iklan kesehatan yang kebenarannya tidak akurat tetapi dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat.

2 Tata Kelola Organisasi dan Pembakuan Standar Prosedur Operasional.

Secara organisasi Dinas Kesehatan yang memiliki UPT (Unit Pelaksana Teknis) memiliki peluang untuk melakukan pengembangan melalui perubahan tata kelola organisasi sehingga sumber daya yang tidak

bisa termanfaatkan dengan kondisi organisasi yang ada saat ini, dengan dilakukannya perubahan tata kelola organisasi, segala sumber daya yang dimiliki bisa termanfaatkan dan dapat mendukung peningkatan capaian kinerja pelayanan. Secara politik dukungan periode pemerintahan saat ini dapat juga dilihat sebagai peluang dengan melihat visi, misi, dan program unggulan yang menjadi janji politik kepala daerah terpilih periode 2019-2024 yang memprioritaskan pembangunan kesehatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan.

Analisis isu-isu strategis adalah pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan di bidang kesehatan sebagai pijakan penting dalam penyusunan rencana Pembangunan daerah bidang kesehatan. Permasalahan Pembangunan kesehatan menggambarkan kinerja daerah atau kondisi kesehatan masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kesehatan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dan generasi di masa mendatang.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan Pembangunan dan isu strategis bidang kesehatan merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan kesehatan di Kota Tarakan 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan permasalahan dan akar permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Adanya Kematian pada ibu, bayi dan balita	Masih Kurangnya peningkatan Kopetensi teknis Sumber daya Kesehatan
			Tidak semua petugas kesehatan telah memiliki kompetensi kegawatan daruratan maternal dan neonatal.
			Ketersediaan Nakes terahap pemunahan layanan kesehatan belum optimal
			Tidak ada pendampingan dari Sp.OG dalam tata laksana rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
			Masih Tingginya faktor risiko pada ibu hamil dengan kelompok umur berisiko , kekurangan energi kronik dan anemia
			Belum terpenuhinya prasarana pendukung layanan sesuai standar (alkes)
			Masih ada RS yang belum memiliki fasilitas intensif (ICU/NICU/PICU) sesuai standar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemantauan kesehatan ibu dan anak tidak maksimal
			belum maksimalnya Keterlibatan jejaring dalam pemenuhan layanan dasar kesehatan ibu dan anak
			Regulasi terkait kewajiban melaporkan pelayanan kesehatan di sektor mandiri atau swasta masih belum maksimal sehingga data layanan tentang kesehatan belum total coverage menggambarkan layanan di Seluruh Kota Tarakan.
		Belum optimalnya penanganan stunting	Tingginya Kasus BBLR
			Adanya masalah Gizi pada penderita penyakit kronik
			Pemantauan pertumbuhan balita yang mengalami masalah gizi tidak terpantau dan ditindaklanjuti dengan baik
			Masih ditemukannya anemia pada ibu hamil
			Belum optimalnya penanganan 4T pad ibu hamil
			Pengelolaan PMT untuk ibu hamil dan anak balita tidak terpantau dengan baik
			Tidak terpantaunya pemberian tablet FE pada remaja putri

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih ditemukan ibu hamil KEK
			Rencana Aksi lintas OPD tidak terevaluasi dengan baik
		Rendahnya status indeks keluarga sehat	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan secara berkala
			Adanya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melebihi standar
			Keterbatasan dalam pemenuhan jenis obat penyakit kronis di FKTP
			Mobilitas penduduk tinggi sehingga pemantau status kesehatan masyarakat sulit terpantau
			Belum semua rumah tangga menggunakan jamban sehat
			Keterbatasan Bahan habis pakai dalam pemeriksaan penunjang pasien;
			Anggaran dalam pemenuhan kegiatan penyakit menular dan tidak meular Terbatas
			Pemanfaatan teknologi dan informasi terkait pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan baik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum adanya regulasi yang mengatur punishmen bagi penerima layanan yang tidak melakukan pemeriksaan secara berkala
		Belum optimalnya akses dan pelayanan pada tingkat rujukan	Sistem rujukan online (sisrute) belum berjalan dengan optimal
			Sosialisasi tentang pelayanan kesehatan rujukan kepada tenaga medis dan masyarakat yang belum optimal
			Masih Kurangnya peningkatan Kopetensi teknis Sumber daya Kesehatan di RS
			Tidak semua RS memiliki dokter spesialis yang sesuai dengan kebutuhan pasien
			Ketersediaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya belum optimal erhadap pemunahan layanan kesehatan
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung layanan sesuai standar (alkes dan bangunan) dalam rangka penhunahan layanan kesehatan.
			Pembayaran BPJS atas klaim RS terkait tarif INACBG tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan RS melalui peraturan kepala daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Anggaran kurang memadai
		Belum optimalnya cakupan UHC	Ketersediaan anggaran untuk pembiayaan PBI masih terbatas.
			Mobilisasi penduduk meningkat sehingga Tingkat keaktifan kepesertaan BPJS belum maksimal
			Terjadinya Kenaikan Iuran JKN
			Peserta JKN menunggak dikarenakan keluarga tidak mampu
			Regulasi JKN yang belum dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat
		Akuntabilitas Kinerja Belum Efektif	Evaluasi kinerja belum dioptimalkan sebagai bahan acuan perencanaan
			Tingkat kepuasan terhadap layanan masih perlu ditingkatkan

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. maka isu strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu di Tarakan sepanjang 2 (dua) tahun terakhir tercatat mengalami kenaikan dari batas maksimal yang telah ditetapkan tingkat Kota Tahun 2021 sebesar 63 per 100.000 KH, Tahun 2022 sebesar 42 dan tahun 2023 sebesar 127 per 100.000 kelahiran.
2. Angka Kematian Bayi menunjukkan angka peningkatan, Tahun 2021 sebesar 4 per 1000, Tahun 2022 sebesar 7 per 1000, dan 7 per 1000 kelahiran tahun 2023
3. Masih ditemukannya kasus stunting balita di Kota Tarakan. Meskipun prevalensi masih dibawah nasional namun untuk target yang ditetapkan Pemerintah Kota Tarakan masih tinggi. Berdasarkan data Capaian Tahun 2023 sebesar 4,5 % dari target 7,5 %.
4. Pemenuhan SPM bidang kesehatan melalui siklus kehidupan baik memenuhi standar mutu yang masih belum maksimal.
5. Sebagai kota yang berkembang dan statusnya sebagai kota transit bagi orang dan barang yang akan ke wilayah utara Kalimantan, pola penyakit di Tarakan mengalami transisi epidemiologi. Pola penyakit yang terjadi saat ini di Tarakan yaitu masih tersebarnya penyakit menular, meningkatnya kasus penyakit tidak menular, dan re-emerging disease (triple burden), prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat.
6. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
7. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan mencukupi baik dalam jumlah maupun jenis tenaga terutama dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga Kesehatan lainnya. Selain itu, kompetensi tenaga Kesehatan yang juga perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan standard keahlian yang harus dimiliki.

8. Ketersediaan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan kebutuhan logistik yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas sehingga sesuai dengan kebutuhan.
9. Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi PPK BLUD di RS Kota, Puskesmas dan Labkesda perlu dimaksimalkan sehingga tujuan dari PPK BLUD dapat tercapai.
10. Belum maksimalnya penggunaan Data Informasi Kesehatan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan serta kebijakan, hal ini disebabkan banyaknya data yang tersedia namun Analisa dan pemanfaatan teknologi dalam pengolahan data yang masih belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun. Perumusan Tujuan Pembangunan Kota Tarakan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026, Kebijakan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah. Sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) berisi sasaran pokok RPD (Rencana Pembangunan Daerah) periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan Daerah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan Kota Tarakan 2005-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyesuaian tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026. Tujuan dari RPD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 adalah pada tujuan ke 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan hidup dan Prevalensi Stunting. Dan tujuan ke 3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing dengan indikator Nilai RB, dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dengan indikator Nilai Sakip

Tujuan dari Dinas Kesehatan merupakan implementasi dari misi yang termuat di dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk 2 (dua) tahun ke depan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai atau direalisasikan sedangkan Sasaran adalah turunan dari suatu tujuan yang menjelaskan lebih rinci dan lebih spesifik serta dapat diukur dengan

satuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat”

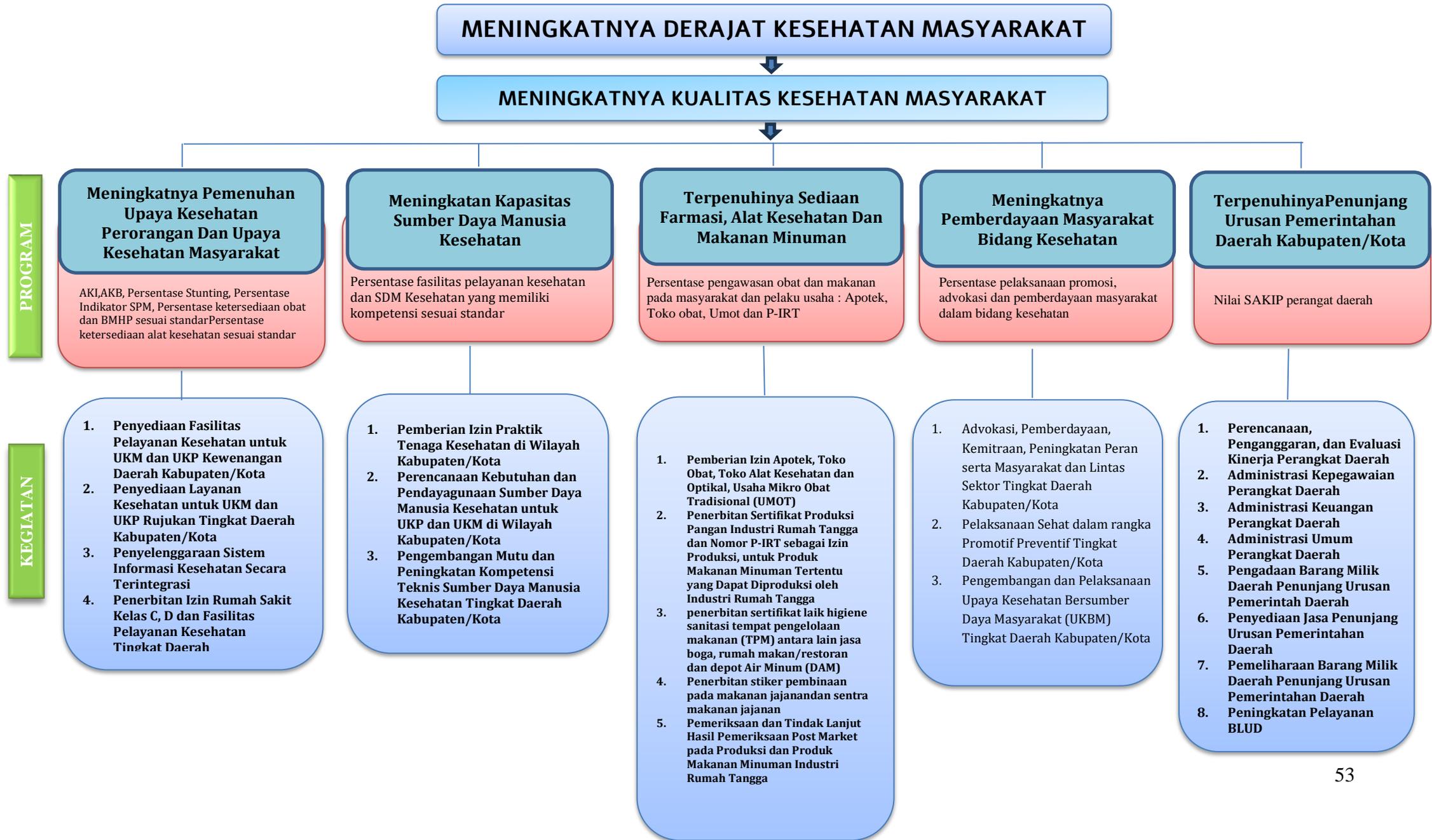
Dengan memperhatikan tujuan tersebut yang kemudian dirumuskan ke dalam sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai selama 2025-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel (T-C 25) di bawah ini.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (Tahun 2023)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	127/100.000 Penduduk	41/100.000 Penduduk	41/100.000 Penduduk
			Angka Kematian Bayi	7/1000 Kelahiran Hidup	6/1000 Kelahiran Hidup	6/1000 Kelahiran Hidup
			Prevalensi Stunting	4,5 %	5%	5%
			Indeks Keluarga Sehat	0,43	0,8	0,8
			Persentase UHC	99,51%	99%	99%
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola perangkat Daerah Dinas Kesehatan	1. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,3	86,3	86,6
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai/Predikat SAKIP	84/A	85/ A	86/A

CASCADING DINAS KESEHATAN



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan kota Tarakan.

Strategi Dinas Kesehatan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan Tujuan yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat”. Berikut ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 2025-2026, yaitu dari Tabel 6 (T-C.26).

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

VISI : -			
MISI : -			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kualitas ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita secara konverhensif	1. Peningkatan deteksi dini ibu hamil dan neonatus resiko tinggi oleh masyarakat dan nakes serta penanganan bumil, bayi, balita resiko tinggi sesuai tatalaksana
			2. Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan (Gizi buruk/ stunting)
		Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan	1. Peningkatan pencegahan dan survailance penyakit serta deteksi dini penyakit menular dan tidak menular
			2. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat
		Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan rujukan	1. Optimalisasi kualitas dan mutu layanan kesehatan sesuai standart
			2.Peningkatan kualitas Pelayanan BLUD

			3. Peningkatan penyediaan sarana dan perbekalan kesehatan
			4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			5. Peningkatan layanan kesehatan dengan pengembangan sistem informasi kesehatan
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Kesehatan	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dalam rangka mencapai tujuan merupakan program dan kegiatan baru mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program dan kegiatan disajikan Tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	132.452.732.739	100%	162.629.707.574	100%	84.649.553.850	
		1202.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	25.000.000	11 Dokumen	25.000.000	11 Dokumen	50.000.000	
		1202.016			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	40.000.000	

1 2 0 2. 0 1 01 6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	10.000.000	
1 2 0 2. 1 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	9 Layanan	9 Layanan	9 Layanan	59.033.533.859	9 Layanan	60.075.553.850	-	60.075.553.850	
1 2 0 2. 0 1 02 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	292 Orang / Bulan	265 org/bulan	265 orang/bulan	35.000.000.000	608 orang/bulan	35.000.000.000	608 orang/bulan	35.000.000.000	
1 2 0 2. 0 1 02 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RS Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang / Bulan	78 Orang / Bulan	98 orang/bulan	12.047.658.259	108 orang/bulan	12.789.678.250	108 orang/bulan	12.789.678.250	
1 2 0 2. 0 1 02 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000.000	12 Dokumen	5.000.000.000	12 Dokumen	5.000.000.000	
1 2 0 2. 0 1 02 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN RS Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.985.875.600	12 Dokumen	7.285.875.600	12 Dokumen	7.285.875.600	
1 2 0 2. 1 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	283.000.000	7 Layanan	283.000.000	7 Layanan	234.000.000	
1 2 0 2. 0 1 05 1			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9 Unit	0	4 Unit	24.000.000	4 Unit	24.000.000	4 Unit	24.000.000	

1	2	0	2.	0			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	297 Paket	342 Paket	600 Paket	210.000.000	600 Paket	210.000.000	600 Paket	210.000.000
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (RSKOTA)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	78 Paket	98 Paket	49.000.000	108 paket	49.000.000		
1	2	0	2.	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	380.000.000	8 Layanan	380.000.000	8 Layanan	480.000.000
1	2	0	2.	0			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000
1	2	0	2.	0			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000
1	2	0	2.	0			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	60.000.000	2 Paket	60.000.000	2 Paket	60.000.000
1	2	0	2.	0			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	6 Laporan	20 laporan	100.000.000	20 laporan	100.000.000	20 laporan	200.000.000
1	2	0	2.	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset/BMD yang diadakan	11 Unit	53 Unit	103 unit	1.000.000.000	104 Unit	21.000.000.000	104 Unit	21.000.000.000
1	2	0	2.	0			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000

1 2 0 2. 0 1 07 6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	52 Unit	100 Unit	300.000.000	100 Unit	300.000.000	100 Unit	300.000.000	
1 2 0 2. 1 1 07 0			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0		1 Unit	20.000.000.000	1 Unit	20.000.000.000	
1 2 0 2. 1 1 07 1			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 unit (Pustaka TP)	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
1 2 0 2. 1 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	7 Layanan	100%	100%	1.430.000.000	100%	1.430.000.000	100%	1.430.000.000	
1 2 0 2. 0 1 08 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	
1 2 0 2. 0 1 08 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	610.000.000	1 laporan	610.000.000	1 laporan	610.000.000	
1 2 0 2. 0 1 08 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	37 petugas	800.000.000	37 petugas	800.000.000	37 petugas	800.000.000	
1 2 0 2. 1 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah aset/BMD yang dipelihara	356 Unit	38 Unit	100%	1.380.000.000	100%	1.380.000.000	100%	1.380.000.000	

				Urusan Pemerintah Daerah										
1 2 0 2. 0 1 09 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 Unit	14 unit	24 unit	20.000.000	24 unit	20.000.000	24 unit	20.000.000	
1 2 0 2. 0 1 09 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	11 Unit	13 unit	300.000.000	13 unit	300.000.000	13 unit	300.000.000	
1 2 0 2. 0 1 09 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	11 Unit	58 unit	60.000.000	58 unit	60.000.000	58 unit	60.000.000	
1 2 0 2. 0 1 09 9				Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	
1 2 0 2. 1 1 09 0				Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	
1 2 0 2. 1 1 10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;				68.921.198.880		78.056.153.724			
1 2 0 2. 1 1 10				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Guling		1 Unit	1.696.000.000	1 Unit	1.776.000.000			PKM Gunung Lingkas

				Penunjang Pelayanan										
1	2	0	2.	1										
		1	10		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Karjo		1 Unit	4.471.494.000	1 Unit	4.695.068.000		PKM Karang Rejo
1	2	0	2.	1										
		1	10		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Juata		1 Unit	1.216.700.000	1 Unit	1.166.700.000		PKM Juata
1	2	0	2.	1										
		1	10		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sebengkok		1 Unit	1.730.000.000	1 Unit	1.456.200.000		PKM Sebengkok
1	2	0	2.	1										
		1	10		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mamb		1 Unit	1.841.000.000	1 Unit	1.285.410.000		PKM Mamburungan
1	2	0	2.	1										
		1	10		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Amal		1 Unit	588.200.000	1 Unit	607.400.000		PKM Pantai Amal
1	2	0	2.	1										
		1	10		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Labkesda		1 Unit	700.000.000	1 Unit	800.000.000		Labkesda
1	2	0	2.	1										
		1	10		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUKT		1 Unit	56.677.804.880	1 Unit	66.269.375.724		RSUKT
1	2	0	2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100%	100%	100%	30.358.974.266	100%	30.358.974.266	100%	24.996.084.457

1	2	0	2.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah UPT yang memiliki fasilitas kesehatan sesuai standar	9 UPT	9 UPT	9 UPT	15.055.11 2.341	9 UPT	12.900.00 0.000	9 UPT	6.400.000 .000	
1	2	0	2.	0		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	1 Dokumen	350.000.0 00	1 unit	5.000.000. 000	1 unit	50.000.00 0.000	YANKES
1	2	0	2.	0		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 RS	1 unit	1 unit	4.000.000. 000	-	-	-	-	
1	2	0	2.	0		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 unit	6 UPTD	1.900.000. 000	6 UPTD	2.900.000. 000	6 UPTD	2.900.000 .000	YANKES
1	2	0	2.	0		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		1 unit	1.200.000. 000	0	-	1 unit	1.200.000 .000	YANKES

1	2	0	2.	1				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit		100 unit	1.000.000.000	100 unit	1.500.000.000	100 unit	1.500.000.000	
1	2	0	2.	1				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 UPTD	1.500.000.000	7 UPTD	1.500.000.000	7 UPTD	1.500.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	0	2.	1				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	120 Unit			3.105.112.341					
1	2	0	2.	2				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		2 paket	2 Paket	2 Paket	2.000.000.000	2 Paket	2.000.000.000	2 Paket	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	0	2.	2				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan	9 UPT	9 UPT	9 UPT	14.479.496.925	9 UPT	16.734.609.266	9 UPT	17.896.084.457	
1	2	0	2.	0				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4792 Orang	4890	5000	100.000.000	5000	100.000.000	5000	100.000.000	Bidang Kesmas (Kesga)
1	2	0	2.	0				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	4806 Orang	4707	4800	70.800.000	4800	80.800.000	4800	70.800.000	Bidang Kesmas (Kesga)

					Kesehatan Sesuai Standar											
1	2	0	2.	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4711 Bayi	4613	4700	100.200.000	4700	110.000.000	4700	100.200.000	Bidang Kesmas (Kesga)
2		02		3												
1	2	0	2.	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7500 Balita	10000	11000	162.999.660	12000	180.999.660	12000	162.999.660	Bidang Kesmas (Kesga)
2		02		4												
1	2	0	2.	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4275 Anak	33220	34000	156.000.000	35000	160.000.000	35000	156.000.000	Bidang Kesmas (Kesga)
2		02		5												
1	2	0	2.	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26884 Orang	47762	48000	160.000.000	49000	180.000.000	49000	160.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2		02		6												
1	2	0	2.	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	7504	8000	50.000.000	9000	50.000.000	9000	49.998.500	Bidang Kesmas (Kesga)
2		02		7												
1	2	0	2.	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10708 Orang	12238	13000	62.994.920	13500	62.994.920	13500	62.994.920	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2		02		8												
1	2	0	2.	0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3551 Orang	3588	3700	50.000.000	3800	50.000.000	3800	34.999.980	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2		02		9												

1	2	0	2.	1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	320 Orang	345	400	50.000.000	400	50.000.000	400	49.999.740	
1	2	0	2.	1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5822 Orang	7295	5503	25.000.000	4872	25.000.000	4872	24.999.900	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1	2	0	2.	1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6677 Orang	7241	6838	55.485.000	9875	55.485.200	9875	55.485.200	
1	2	0	2.	1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.462.200	2 dokumen	75.462.200	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1	2	0	2.	1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21930 orang	19702	22307	42.000.000	22307	42.000.000	22037	2.113.571.027	Bidang Kesmas (Kesga)
1	2	0	2.	1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3000 orang	3500	3500	32.000.000	4000	32.000.000	4000		Bidang Kesmas (Kesjaor)
1	2	0	2.	1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sarana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2826 sarana	2258	2836	100.000.000	2836	100.000.000	2836		Bidang Kesmas (Kesling)
1	2	0	2.	1			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Promosi Kesehatan	48954	48954	48954	49.995.270	48954	49.995.270	48954	213.562.100	Bidang Kesmas (Promkes)

1	2	0	2.	2				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 dokumen	3 dokumen	154.013.700	3 dokumen	170.000.000			
1	2	0	2.	2				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	96 Orang	370 org	100 org	50.000.000	120 org	70.000.000			
1	2	0	2.	2				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	9 dokumen	10 dokumen	635.231.735	11 dokumen	80.000.000			
1	2	0	2.	2				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	4 dokumen	8 dokumen	10.724.688.320	8 dokumen	13.210.783.696	8 dokumen	13.039.922.910	YANKES
1	2	0	2.	2				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	500 orang	480	250 org	75.000.000	300 org	85.000.000			
1	2	0	2.	2				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 paket	5 paket	68.000.000	6 paket	69.000.000			
1	2	0	2.	2				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen			25.000.000					
1	2	0	2.	3				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Unit	4 unit	6 unit	100.000.000	6 unit	200.000.000	6 unit	200.000.000	YANKES

					yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas										
1	2	0	2.	3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	Yankes
1	2	0	2.	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	7 unit	7 kegiatan	200.000.000	10 kegiatan	300.000.000	10 kegiatan	300.000.000	Yankes
1	2	0	2.	3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		2 laporan	35.000.000	4 laporan	40.000.000			
1	2	0	2.	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pertemuan Koordinasi Terintegrasi Lintas Program atau dengan Lintas Sektor Kota Puskesmas, Analisis Hasil PISPK, Monev PISPK, Kunjungan Rumah	3 kegiatan	3 kegiatan	1000 Kegiatan	100.000.000	1300 Kegiatan	100.000.000	1300 Kegiatan	100.000.000	YANKES
1	2	0	2.	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis		1251 orang	749 orang	1019	45.000.000	903	60.000.000			

1	2	0	2.	4			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/OADS (ODHA)			108 orang	120 orang	50.000.000	110	60.000.000			
1	2	0	2.	4			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria		400 orang	910 orang	960 orang	50.000.000	980 orang	60.000.000			
				4			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Catin dan Aakseptor aktif yang dilakukan pelayanan kesehatan reproduksi	36726	38638	38638	31.500.000	38.638	31.500.000	38.638	31.500.000	Bidang Kesmas (Kesga)
				4			Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah ibu dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10000	10000	11000	393.588.320	12000	393.588.320	12000	393.588.320	Bidang Kesams (Kesga)
1	2	0	2.	4		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah OPD dan UPT yang menerapkan sistem informasi	9 Layanan	9 Layanan	9 Layanan	350.000.000	9 Layanan	400.000.000	9 Layanan	400.000.000	
1	2	0	2.	0			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	YANKES
1	2	0	2.	4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	100 Persean	7 unit	7 unit	474.365.000	7 unit	324.365.000	7 unit	300.000.000	

1	2	0	2.	0			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit		100 kegiatan	100.000.000		100 kegiatan	100.000.000	YANKES	
1	2	0	2.	0			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	7 Unit	7 unit	15 kegiatan	194.365.000	15 kegiatan	15 kegiatan	300.000.000	YANKES	
1	2	0	2.	0			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	40 Dokumen		6 dokumen	180.000.000	6 dokumen	6 dokumen	180.000.000	YANKES	
1	2	0	3				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%	386.931.600	100%	536.931.600	100%	536.931.600	
1	2	0	2.	0			Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang terpenuhi kebutuhan SDM sesuai standar	9 UPT	9 UPT	9 UPT	300.000.000	9 UPT	450.000.000	9 UPT	450.000.000	

1	2	0	2.	0				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	70 Orang		75 Orang	150.000.0 00	85 Orang	250.000.0 00	85 Orang	250.000.0 00
1	2	0	2.	0				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Doku men		1 Dokum en	150.000.0 00	1 Dokum en	200.000.0 00	1 Dokum en	200.000.0 00
1	2	0	2.	0				Pengemba ngan Mutu dan Peningkat an Kompeten si Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	8 UPT	8 UPT	8 UPT	86.931.60 0	8 UPT	86.931.60 0	8 UPT	86.931.60 0
1	2	0	2.	0				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	84 Orang	100 Orang	86.931.60 0	150 Orang	86.931.60 0	150 Orang	86.931.60 0
1	2	0	4					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100%	100%	100%	410.000.0 00	100%	610.000.0 00	100%	610.000.0 00

1	2	0	2.			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisiona		Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan											
		4	01			1 (UMOT)			25 Izin	25 Izin	25 Izin	100.000.000	25 Izin	150.000.000	25 Izin	150.000.000			
1	2	0	2.	0			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100.000.000	25 Dokumen	150.000.000	25 Dokumen	150.000.000			
		4	01	1															
1	2	0	2.			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduks		Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduks											
		4	03			oleh Industri Rumah Tangga		oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	194 IRTP	194 IRTP	194 IRTP	260.000.000	194 IRTP	260.000.000	194 IRTP	260.000.000			

1	2	0	2.	0			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	194 sarana	0 Sarana	194 Sarana	260.000.000	194 Sarana	260.000.000	194 Sarana	260.000.000
1	2	0	2.	0		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah pemeriksaan post masket dan pengelolaan data perizinan produk makanan dan minuman IRT	96 sarana	70 Sarana	96 Sarana	50.000.000	96 Sarana	200.000.000	96 Sarana	200.000.000
1	2	0	2.	0			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	96 Sarana	70 Sarana	96 Sarana	50.000.000	96 Sarana	200.000.000	96 Sarana	200.000.000

1	2	0	5	Program Pembedayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100%	100%	100%	1.742.820.000	100%	1.826.620.000	100%	1.826.620.000	
1	2	0	2.5	01	Advokasi, Pembedayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Advokasi, Pembedayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.676.000.000	1 Dokumen	1.759.800.000	1 Dokumen	1.759.800.000	
1	2	0	2.5	01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.676.000.000	1 Dokumen	1.759.800.000	1 Dokumen	1.759.800.000	Bidang Kesmas (Promkes)
1	2	0	2.5	02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan kegiatan promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	1 Kegiatan	5 kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	50.000.000	
1	2	0	2.5	02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Kegiatan	5 kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	50.000.000	Bidang Kesmas (Promkes)
1	2	0	2.5	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat		Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	4 Kegiatan	30 kegiatan	50 kegiatan	16.820.000	50 kegiatan	16.820.000	50 Kegiatan	16.820.000	

				t (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota														
	1	2	0 5	2. 03	0 1			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3Kegiatan	30 kegiatan	50 kegiatan	16.820.00 0	50 kegiatan	16.820.00 0	50 Kegiatan	16.820.00 0	Bidang Kesmas (Promkes)

Tabel T-C.27.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Sebengkok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1.730.000.000,00	1 unit	1,456,200,000	1 unit	1,406,200,000

Tabel T-C.27.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Gunung Lingkas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1,696,000,000	1 unit	1,776,000,000.00	1 unit	1,776,000,000

Tabel T-C.27.4
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Pantai Amal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	588.200.000,00	1 unit	607.400.000,00	1 unit	607.400.000,00

Tabel T-C.27.5
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Juata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1,166,700,000.00	1 unit	1,166,700,000.00	1 unit	1,166,700,000.00

Tabel T-C.27.7
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Mamburungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1.841.000.000,00	1 unit	1,285,410,000	1 unit	1,285,410,000

Tabel T-C.27.8
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Mamburungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1.841.000.000,00	1 unit	1,285,410,000	1 unit	1,285,410,000

Tabel T-C.27.9
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Puskesmas Karang Rejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	4,471,494,000	1 unit	4,695,068,000	1 unit	4,695,068,000

Tabel T-C.27.10
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD Labkesda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14	
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%								
					Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	700,000,000.00	1 unit	800,000,000	1 unit	800,000,000

Tabel T-C.27.11
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BLUD RS Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
									Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									7		Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
		12012.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85							
		12012.101		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	56,677,804,880.00	1 unit	66,269,375,724.00	1 unit	66,269,375,724.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG KESEHATAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam pencapaian tujuan periode Tahun 2025-2026. Penetapan indikator mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang telah ditetapkan

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Kematian Ibu	127/100000	41/100.000	41/100.000	41/100.000
2	Angka Kematian Bayi	7/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	4,56 %	5%	5%	5%
4	Indeks Keluarga Sehat	0.43	0.70	0.80	0.80
5	Cakupan Kepesertaan JKN	99,51	99,51%	99,51%	99,51%
6	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	84/A	85/A	86/A	86/A
7	Indeks Kepuasan masyarakat	85,29	86,02	86,06	86,50
8	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98.00%	100%	100%	100%
9	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99.00%	100%	100%	100%
10	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97.00%	100%	100%	100%
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100.00%	100%	100%	100%
12	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.05%	100%	100%	100%
13	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	86.00%	100%	100%	100%
14	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100.00%	100%	100%	100%
15	Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.83%	100%	100%	100%
16	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64.23%	100%	100%	100%
17	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100.91%	100%	100%	100%
18	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	103.60%	100%	100%	100%
19	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar	102.23%	100%	100%	100%
20	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	92,8 %	93,02 %	93,04 %	93,50 %
21	Persentase Alat Kesehatan di UPT yang telah Terkalibrasi	78,86 %	80%	80%	80%
22	Jumlah UPT yang Terakreditasi	8	8	8	8

23	Cakupan Pneumonia Balita	71.90%	100%	100%	100%
24	Cakupan Penemuan Diare Semua Umur	41.35%	100%	100%	100%
25	Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun yang Dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	2,57	40%	40%	40%
26	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Minimal 100 %	62,31%	100%	100%	100%
27	Cakupan Imunisasi dasar Lengkap	62,2 %	100%	100%	100%
28	Cakupan Kelurahan yang Mengalami KLB dilakukan PE < 24 Jam	100%	100%	100%	100%
29	Persentase Posyandu Aktif	73.65%	80%	80%	80%
30	Persentase PHBS Tatanan Rumah Tangga	53,11 %	54%	54%	54%
31	Prevalensi wasting pada balita (kurus dan sangat kurus)	1,20 %	5%	5%	5%
32	Persentase Tindak lanjut kasus gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing, dan kerbau)	100%	100%	100%	100%
33	Angka Kesakitan (IR) DBD	166	<10	<10	<10
34	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	79,39 %	100%	100%	100%
35	Rasio Posyandu persatuan balita	0,9	0,9	0,9	0,9
36	Rasio Daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	2,70	2,71	2,80	2,80
38	Rasio Dokter per satuan penduduk	69,5/100.000	70/100.000	70/100.000	70/100.000
39	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	5,7/1000	5,7/1000	5,7/1000	5,7/1000
40	Persentase RS Rujukan tingkat kota yang terkreditasi	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang kesehatan untuk periode 2 (dua) Tahun 2025-2026. Renstra ini disusun sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

RENSTRA merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang kemudian turunan dari RENSTRA berupa rencana kerja (RENJA) yang merupakan rencana tahunan Dinas Kesehatan Kota Tarakan sehingga RENSTRA akan menjadi acuan di dalam penyusunan RENJA dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun-tahun berikutnya. Sasaran, program, dan kegiatan dalam pembangunan Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di kota Tarakan.

Renstra Dinas Kesehatan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA akan dievaluasi dan Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kesehatan ini.